



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2023-2026**



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

PENDAHULUAN I

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Gubernur untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD Provinsi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi agar memperhatikan :

1. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021.

3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome).
4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.
5. Kebijakan nasional.
6. Regulasi yang berlaku.
7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Publik;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pada dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan sasaran dan indikator Perangkat Daerah;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2023-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan
- 5.2. Program Unggulan

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

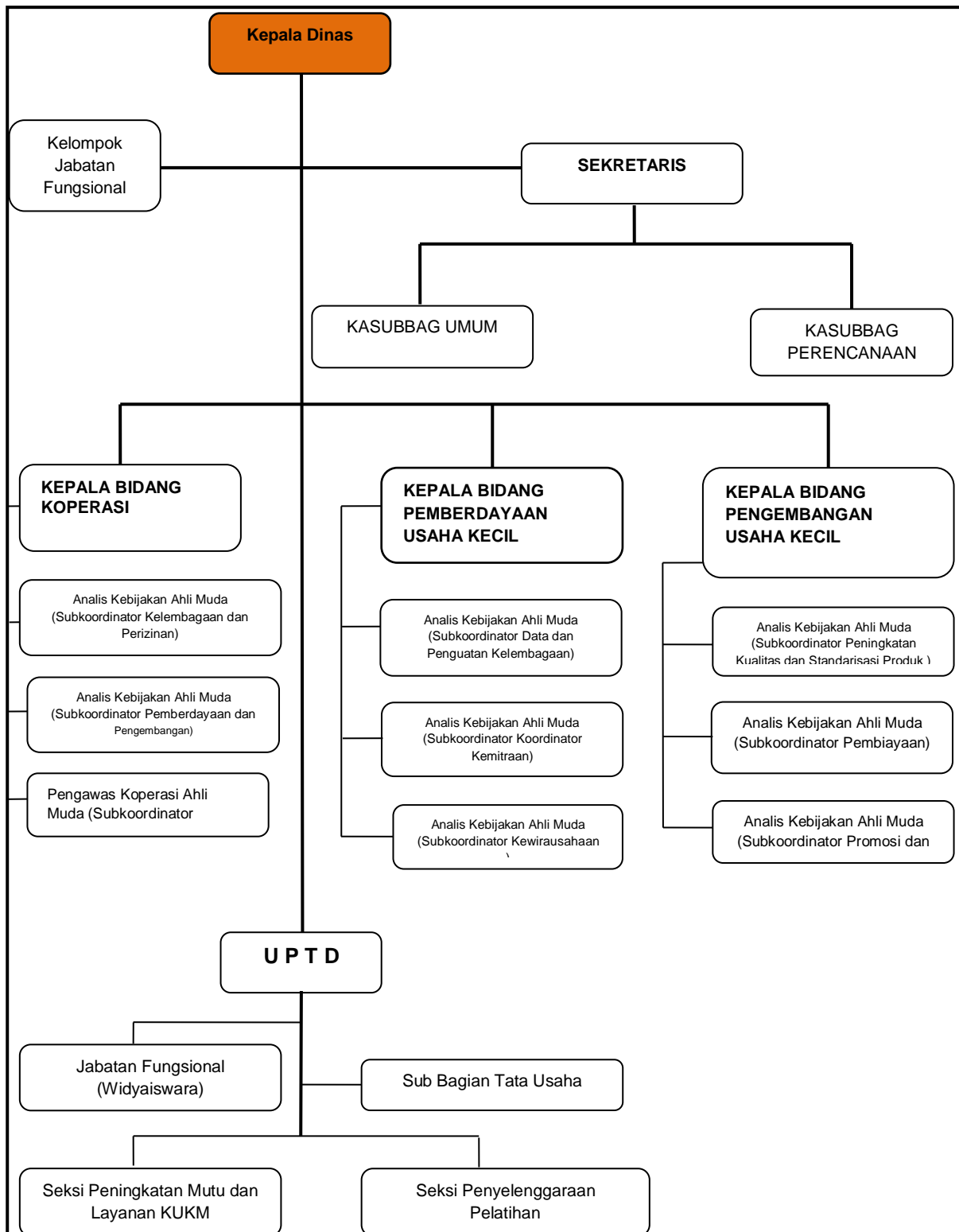
Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana dalam gambar 2.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didukung oleh tiga bidang, satu sekretariat, dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-

masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam Penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Balai Latihan Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan program kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi bidang Koperasi, Bidang Pemberdayaan usaha kecil, Bidang Pengembangan Usaha Kecil, dan kesekretariatan, serta Koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. menyelenggarakan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha kecil, Bidang Pengembangan Usaha Kecil, kesekretariatan, serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan Koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan lingkup Dinas;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;

- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- o. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- p. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- q. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- r. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3 . BIDANG KOPERASI

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Koperasi.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Koperasi;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Koperasi;
- c. Penyelenggaraan verifikasi penyusunan rumusan kebijakan bidang koperasi;
- d. Penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Penyelenggaraan verifikasi data kesehatan KSP /USP;
- g. Penyelenggaraan verifikasi rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- h. Penyelenggaraan verifikasi rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan kelembagaan dan perizinan, pemberdayaan dan pengembangan, dan pengawasan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberdayaan dan pengembangan koperasi dalam peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- n. Penyelenggaraan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/ Kota;
- o. Penyelenggaraan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/ Kota;
- p. Penyelenggaraan evaluasi seluruh kegiatan kelembagaan dan perizinan, pemberdayaan dan pengembangan, dan pengawasan;
- q. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- r. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- s. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4 . BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Tugas: memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pemberdayaan UKM;

- c. Penyelenggaraan verifikasi data UKM;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan potensi kewirausahaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penciptaan iklim kewirausahaan;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kemitraan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan;
- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5 . BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Tugas: memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha Kecil.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Kecil;
- c. Penyelenggaraan verifikasi data untuk bahan perumusan kebijakan Pengembangan Usaha Kecil;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan di bidang peningkatan kualitas dan standarisasi produk;

- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan akses pembiayaan/ permodalan;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan promosi dan pemasaran produk baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan usaha di bidang produksi, pengembangan diversifikasi produk dan standarisasi produk;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan strategi pengembangan usaha;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan peningkatan kualitas dan standarisasi produk, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- j. Penyelenggaraan evaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas dan standarisasi produk, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6 UPTD BALAI PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM

Tugas: melaksanakan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Fungsi:

- a. penyelenggara pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM
- b. penyelenggara dan koordinasi pelatihan tenaga KUMKM.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2022 dalam melaksanakan pengelolaan urusan

Pemerintahan didukung sebanyak 94 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 55 orang PNS.

Jumlah tenaga honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 berjumlah 39 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 29 orang, D3 sebanyak 8 orang, SMU sebanyak 9 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 14 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS/CPNS) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	1	-	1
2	Pasca Sarjana/ S2	5	6	11
3	Sarjana / S1	16	9	25
4	Diploma-IV	1	-	1
5	Diploma-III	3	4	7
6	SLTA	7	3	10
7	SLTP	-	-	-
JUMLAH		33	22	55

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PHL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana / S1	9	5	14
2	Diploma-III	3	-	3
3	SLTA	14	7	21
4	SLTP	1	-	1
JUMLAH		27	12	39

**Tabel 2.3 Klasifikasi Eselon Pegawai PNS/CPNS
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2022**

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	1	-	1
2	II B	-	-	-
3	III A	2	2	4
4	III B	-	1	1
5	IV A	9	5	14
6	IV B	-	-	-
7	Non Eselon	14	13	27
8	Fungsional	7	1	8
JUMLAH		33	22	55

**Tabel 2.4 Klasifikasi Keadaan Pegawai PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022**

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	1	-	-	-	-	1
3	SLTA	21	-	8	2	-	31
4	Ahli Madya	3	-	2	5	-	10
5	Sarjana Terapan (Diploma IV)	-	-	-	1	-	1
6	Sarjana (S1)	14	-	-	22	3	39
7	Pasca Sarjana	-	-	-	3	8	11
8	Doktoral/ S3	-	-	-	-	1	1
Jumlah		39	-	10	33	12	94

2.2.2. Asset

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu gedung dan tanah, kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua sebanyak 4 unit serta sarana dan prasarana lainnya seperti komputer, laptop, Printer, meja kerja, lemari, kursi kerja dan lain-lain.

a. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.5 Asset berupa Tanah dan Bangunan

NO	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M ²)	KONDISI (%)
1.	Tanah Kantor	Komplek Permukiman dan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Gedung PLUT)	20.326	100
2.	Tanah Kantor	Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.619	100
3.	Bangunan Kantor	Jalan Pulau Lepar Desa Padang Baru Bangka Tengah Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1102	90
4.	Bangunan Kantor UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian	Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1082	95
5.	Bangunan Asrama UPTD Balkop	Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	472,5	95
6.	Bangunan Ruang Kelas UPTD Balkop	Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	180	95
7.	Bangunan PLUT	Jl. Pulau Pelepas, Bacang, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	700	90

8.	Mushola	Jalan Pulau Lepar Desa Padang Baru Bangka Tengah Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100	98
----	---------	--	-----	----

b. Kendaraan Dinas

Tabel 2.6 Asset berupa Kendaraan Dinas

NO	JENIS	MERK	TAHUN KENDARAAN	JUMLAH (Unit)
1	Kendaraan Roda 2	Suzuki/Thunder EN 125 CC	2005	1
2	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
3	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
4	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
5	Kendaraan Roda 2	Jupiter Mx /135 CC	2008	1
6	Kendaraan Roda 4	Suzuki/APV	2012	1
7	Kendaraan Roda 4	Toyota Avanza Veloz1500CC	2014	1
8	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
9	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
10	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
11	Kendaraan Roda 2	Yamaha Vixion+KS/Merah 150CC	2014	1
12	Kendaraan Roda 4	Toyota Kijang Inova 1998 CC	2015	1
JUMLAH				12

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja dan realisasi

anggaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dalam tabel 2.5 dan 2.6.

Pada tabel 2.5 disajikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Urutan pertama sampai tiga belas merupakan IKU yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Sedangkan urutan empat belas sampai tujuh belas merupakan IKU dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2017-2022. Perubahan tersebut merupakan implikasi dari perubahan struktur organisasi dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari tabel dapat diketahui bahwa target – target yang ditetapkan tahun 2017-2022 dalam rencana strategis dapat tercapai dan diproyeksikan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 juga dapat tercapai pada akhir periode tahun 2021.

1. Jumlah Koperasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per kabupaten Kota pada tahun 2021 sebanyak 708 Koperasi aktif, terbanyak di Kabupaten Bangka 140 koperasi, kemudian diikuti Kabupaten Bangka Barat sebanyak 107 koperasi dan terendah di Kota Pangkalpinang sebanyak 66 koperasi.

Gambar 1.2 Jumlah Koperasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

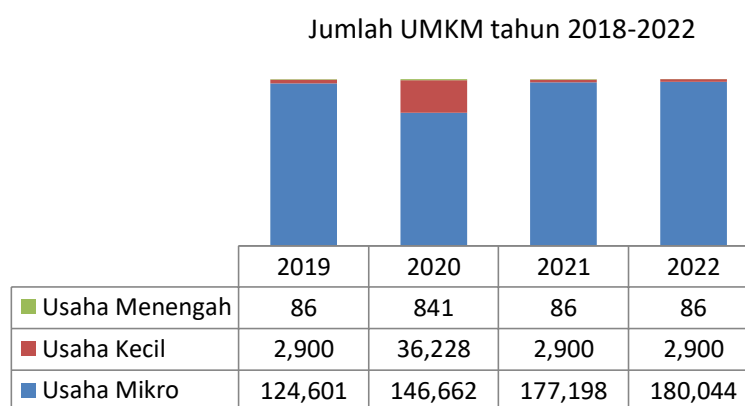


2. Pertumbuhan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

UMKM adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM diklasifikasikan menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Jumlah UMKM di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat terutama untuk usaha mikro yang merupakan usaha terbanyak di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2019 jumlah usaha mikro sebanyak 124.601 usaha meningkat menjadi 146.662 usaha pada tahun 2020 kemudian meningkat lagi menjadi 180.044 usaha pada tahun 2022

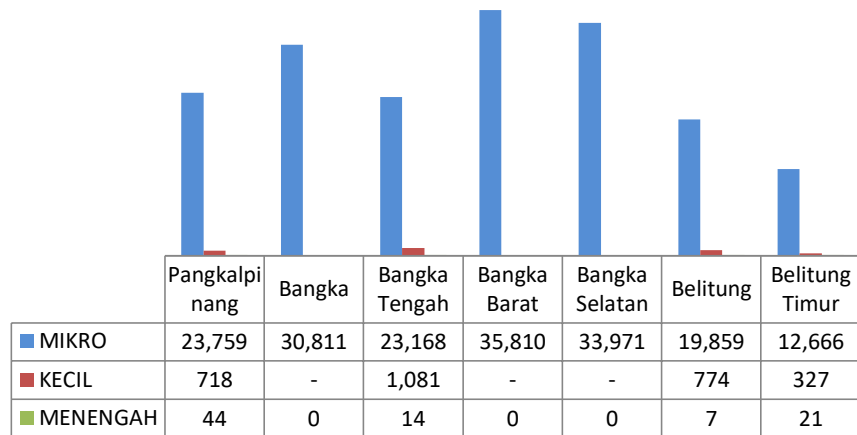
Tabel 2.5 Jumlah UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022



Untuk Jumlah UMKM di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, untuk usaha mikro terbanyak di Kabupaten Bangka Barat 35.180 usaha, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 33.971 usaha. Sedangkan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 12.666 usaha.

Tabel 2.6 Jumlah UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022

Jumlah UMKM di Kabupaten Kota Tahun 2022



Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian				3%	3%	3%	3%	3%										
Persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi				1%	1%	1%	1%	1%										
Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih				1,38%	3,09 %	4,68 %	3,44 %	4,68 %										
persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih				0%	0,34 %	0,36 %	0,34 %	0,37 %										
persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan				100%	100%	100%	100%	100%										
Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi sektor pertanian				5%	5%	5%	5%	5%										

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase koperasi berkualitas sektor pertanian				2%	2%	2%	2%	2%										
Persentase produk usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi				61.30%	77%	43.48%	43.48%	43.48%										
Pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan				0	3%	3%	0	3%										
Pertumbuhan volume usaha kecil				0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%										
Pertumbuhan pelaku usaha kecil				5%	5%	5%	2%	6%										
Persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan				5%	5%	5%	5%	5%										
Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih				1.38%	3.09%	4.68%	3.44%	4.68%										
Persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih				0.36%	0.25%	0.25%	0.26%	0.29%										

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase pelaku usaha terlatih bidang keterampilan usaha produktif				0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%										
Persentase koperasi bidang kelautan dan perikanan yang berkualitas				3,60%	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %										
Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi sektor kelautan dan perikanan				5%	5%	5%	5%	5%										
Peningkatan produk Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi				550	550	550	550	550										
Pertumbuhan volume usaha kecil				0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%										
Pertumbuhan pelaku usaha kecil				7%	7%	7%	7%	7%										
Persentase koperasi aktif dikawasan strategis minapolitan lepar pongok				1%	1%	1%	1%	1%										
Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik				1%	1%	1%	1%	1%										

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan tanjung binga				1%	1%	1%	1%	1%										
Pertumbuhan kelembagaan koperasi pendukung pariwisata				2.70%	2.70%	2.70%	2.70%	2.70%										
Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih				0.69%	2.06%	1.51%	2.75%	2.20%										
Persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih				0.06%	0.25%	0.32%	0.32%	0.32%										
Penumbuhan produk parekraf				10%	10%	10%	10%	10%										
Persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata				1%	1%	2%	2%	2%										
Persentase koperasi sektor pariwisata yang berkualitas				1%	1%	1%	1%	1%										
Peningkatan produk usaha kecil sektor pariwisata yang terstandarisasi dan tersertifikasi				205	250	250	250	250										

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pertumbuhan volume usaha kecil				0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%										
Pertumbuhan pelaku usaha kecil				3%	3%	3%	3%	3%										
Persentase SDM Koperasi sektor pertambangan terlatih				0,014 %	0,045 %	0,03%	0,05%	0,04%										
Persentase SDM usaha kecil sektor pertambangan terlatih				0,046	0,135%	0,1%	0,13%	0,1%										
Persentase koperasi aktif sektor pertambangan																		
Persentase koperasi aktif di kawasan strategis teluk kelabat belinyu				1%	1%	1%	1%	1%										
Persentase peningkatan wirausaha				15%	15%	15%	15%	15%										
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM				90%	92%	94%	96%	98%										

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	3,300,000,000	3,500,000,000	3,900,000,000	4,400,000,000	5,000,000,000	3,218,763,750	5,754,479,900	3,010,177,300			0.98	1.64	0.77			0.04	0.04
Pelayanan administrasi perkantoran	2,420,000,000	2,480,000,000	2,600,000,000	2,850,000,000	3,080,000,000	2,472,697,350	4,247,813,400	2,855,425,950			1.02	1.71	1.10			0.04	0.20
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	515,000,000	600,000,000	800,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	549,578,400	1,325,043,100	100,350,000			1.07	2.21	0.13			0.25	0.24
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100,000,000	100,000,000	135,000,000	150,000,000	150,000,000	81,175,000	-	-			0.81	0.00	0.00			0.18	-0.50
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110,000,000	150,000,000	180,000,000	200,000,000	250,000,000	49,109,600	161,850,000	-			0.45	1.08	0.00			0.28	0.65

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	140,000,000	150,000,000	160,000,000	170,000,000	250,000,000	59,063,400	19,773,400	54,401,350			0.42	0.13	0.34			0.07	0.54
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	70,000,000	7,140,000					0.48	0.00	0.00			0.29	-0.50
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	294,000,000	814,650,000	956,998,000	1,049,624,000	1,007,059,200	605,011,630	982,915,150	152,834,800			2.06	1.21	0.16			0.97	-0.11
2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	110,250,000	244,500,000	409,500,000	269,100,000	456,106,000	2,907,202,350	5,486,396,050	2,792,733,625			26.37	22.44	6.82			0.95	0.20

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	1,006,950,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	3,680,045,900	2,546,074,000	4,440,967,870			3.65	2.83	4.93			-0.05	0.22
3. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	256,500,000	632,250,000	900,000,000	730,000,000	1,008,000,000	614,307,840	1,081,796,900	178,816,900			2.39	1.71	0.20			0.94	0.00
3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	560,000,000	620,000,000	670,000,000	720,000,000	800,000,000	71,830,100	216,600,700	1,435,851,300			0.13	0.35	2.14			0.09	3.82

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun		Capaian Renstra Tahun		Rasio Capaian Tahun	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai Sakip PD (pakai angka)				4	4				
survey kepuasan pelayanan internal				100%	100%				
Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan				20%	20%				
Persentase Koperasi Aktif				70%	70%				
Persentase Koperasi berkualitas				50%	50%				
Persentase SDM Koperasi yang terlatih				30%	30%				
Persentase Koperasi yang diberdayakan				20%	20%				

Persentase UMKM yang diberdayakan				1%	1%				
Persentase Usaha Kecil yang dikembangkan				1%	0.88%	1%	3%		

Tabel 2.3.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-		Realisasi Renstra Tahun ke-		Rasio capaian tahun ke-	
		4	5	4	5	4	5
Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
Bidang Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	226,650,000	226,650,000	-		0.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	367,662,000	367,662,000	135,877,600		0.370	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi berkualitas	182,797,500	182,797,500	115,475,300		0.632	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	2,422,470,126	450,000,000	2,296,720,300		0.948	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	755,148,000	755,148,000	259,659,600		0.344	

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	2,217,568,624	2,217,568,624	757,319,800		0.342	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	2,203,342,000	2,203,342,000	1,397,323,000		0.634	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan Koperasi dan UKM. Pemerintah Daerah memiliki tantangan bagaimana meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam memanfaatkan teknologi untuk dapat mengakses pemasaran, pembiayaan, maupun meningkatkan produktivitasnya. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah beberapa proses perijinan terkait urusan Koperasi dan UKM juga telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Di sisi lain, peluang juga meningkat seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi. Sebagai contoh adalah dengan berkembangnya berbagai online marketplace, Pemerintah dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak – pihak tersebut untuk mempercepat adaptasi Koperasi dan UKM terhadap teknologi. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga memiliki peluang untuk menurunkan tingkat kesenjangan peran serta laki – laki dan perempuan terutama dalam perekonomian. Dinas Koperasi dan UKM dapat mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang ada untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam berwirausaha dan memandirikan usahanya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

IV

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan Perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,0 % dan 5,2% pada tahun 2023 seiring dengan pulihnya permintaan domestic dan menurunnya tingkat penyebaran COVID-19 serta semakin tumbuhnya perekonomian dalam negeri. Hal senada juga disampaikan Menteri Bappenas untuk proyeksi ekonomi pada penyusunan RKP 2023 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,3-5,9%.

Sejalan dengan optimisme perekonomian Indonesia, perekonomian Bangka Belitung diproyeksikan meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini sudah terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sudah mengalami rebound sejak terpaan pandemic COVID-19 melanda dunia pada tahun 2019. Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen setelah sempat berkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar 2,30 persen sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah kembali bangkit yang terlihat dari pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,16 persen, diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 10,62 persen serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,42 persen.

Gambar 3.1. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 (persen)

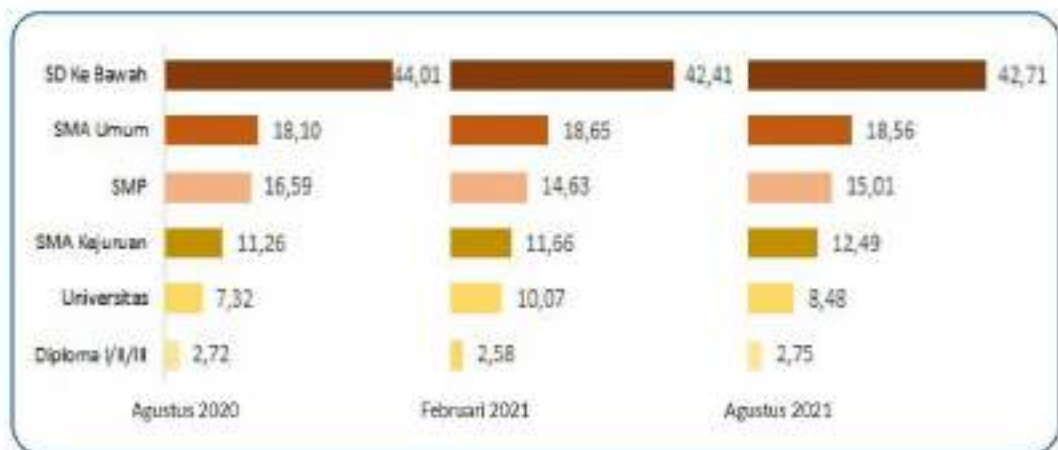


Sumber : BRS, Badan Pusat Statistik Prov. Kep. Babel, Februari 2022

Dari aspek ketenagakerjaan, Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk usia kerja pada Februari 2022 sebanyak 1.124,19 ribu orang, naik sebanyak 11,02 ribu orang jika dibanding Februari 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 788,77 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 335,42 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2022 terdiri dari 755,81 ribu orang penduduk yang bekerja dan 32,95 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 31,89 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 37,12 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 5,23 ribu orang. Untuk sector UMKM, tenaga kerja yang bekerja di sector UMKM tahun

2022 sebesar 562.156 orang atau sekitar 74,38% menurun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 550.740 atau 76,63%, sedangkan untuk tahun 2023 diperkirakan meningkat seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha khususnya UMKM. Besarnya kontribusi jumlah tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja, tidak diikuti dengan kualitas dan kapasitas tenaga kerja UMKM, dimana tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Bangka Belitung sekitar 57,72% lulusan SMP, sedangkan 31,05% lulusan SMA atau sederajat dan 11,23% lulusan SI atau sederajat. Sehingga pembangunan sector koperasi dan UKM terasa lambat dengan produktivitas tenaga kerja juga rendah dan kalah bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia.

Gambar 3.3. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 (persen)



Sumber : BRS, Badan Pusat Statistik Prov. Kep. Babel, Agustus 2021

Di samping itu permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah cukup kompleks, selain kualitas SDM, masalah pemasaran produk, bahan baku, infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam pembangunan sector Koperasi dan UKM. Dari sisi pemasaran, produk-produk UMKM kurang dikenal karena minimnya promosi dan pemasaran, serta pemanfaatan digitalisasi yang kurang optimal dalam pengenalan produk atau hasil karya UMKM baik di tingkat nasional maupun Internasional. Apalagi pada saat pandemic COVID-19 masih tinggi, sector dunia usaha menjadi salah satu korban terparah,

dengan kebijakan social distancing, PPKM atau lockdown dan pembatasan penerbangan menjadi anjloknya pendapatan dunia usaha dan menurunnya promosi dan pemasaran produk-produk UMKM. Selain itu permasalahan bahan baku menjadi focus yang cukup sentral karena keberlangsungan hidup UMKM tergantung dari ketersediaan bahan baku. sebagai satu contoh kerajinan lidi Nipah yang sudah diperkenalkan di pasar luar, dan sekarang menjadi produk kerajinan ekspor, masih dipertanyakan keberlangsungannya kerana bahan baku yang terbatas. Selain itu kendala permodalan masih menjadi satu permasalahan klasik, walaupun Bank Indonesia pada laporan kajian ekonomi regional menyebutkan angka penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melebihi target, namun kenyataannya masih banyak UMK yang mengeluhkan kurangnya permodalan untuk pengembangan usahanya.

BOX

1

4.5 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



PERUBAHAN (%)
 TW III 2021 -5,10
 TW IV 2021 9,83 ▲

Rasio penyaluran kredit UMKM di Bangka Belitung telah melebihi target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 20%. Secara nominal, penyaluran kredit UMKM di Bangka Belitung pada triwulan ini mencapai Rp5,76 triliun atau sebesar 32,78% terhadap total kredit perbankan.

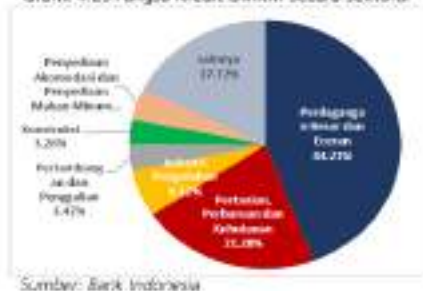
Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 9,83% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,10% (yoy). Meningkatnya kredit UMKM disebabkan oleh meningkatnya kredit modal kerja dan investasi. Pelonggaran PPKM pada triwulan IV 2021 membuat UMKM melakukan ekspansi usaha.

Grafik 4.28 Perkembangan Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.29 Pangsa Kredit UMKM Secara Sektoral



Sumber: Bank Indonesia

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Prov. Kep.Babel, Februari 2022

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan pada urusan Koperasi, Usaha kecil dan menengah diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.1 Keterkaitan Masalah Pokok, Maslaha dan Akar masalah untuk urusan Koperasi, Usaha kecil dan menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM	Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
		Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM
	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM	Rendahnya aspek kelembagaan KUKM
		Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM
		Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM
		Rendahnya ketersediaan dan akurasi data KUKM.
	Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM	Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai
		Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah

Arah Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusung Visi **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju berwawasan Lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia handal dan**

Pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera” dan dengan 5 Misi yaitu :

1. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2023-2026 selaras dalam mendukung Misi 4, Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan sasaran daerah meningkatkan kesempatan kerja dan dengan indicator persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi dan persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Usaha Kecil dan Menengah.

3.3. Telahan terhadap Renstra Kementerian

Arah Kebijakan pembangunan urusan Koperasi dan UKM seperti yang tertuang dalam Renstra Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 mengusung Visi “ Terwujudnya Koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dengan Misi Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden ke-2 (Struktur ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing). Untuk mencapai misi ini maka tujuannya adalah :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi baru yang maju dan Modern dengan Indikator, a. Modernisasi koperasi; b. Melahirkan Wirausaha Baru
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestic dan global, dengan indicator a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chain (GVC); b. UMKM Naik kelas (Scaling Up)

3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja Tinggi, dengan indicator : a. Indeks RB Kementerian Koperasi dan UKM; b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Kebijakan Nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan usaha, investasi, ekspor dan daya saing ekonomi pada tahun 2020-2024 yang mencakup penguatan kewirausahaan, Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini sejalan dengan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2023-2026 dengan sasaran meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM yang mencakup penguatan kewirausahaan, permuktahiran data KUKM, peningkatan promosi dan pemasaran, penguatan kapasitas melalui pelatihan –pelatihan teknis, pemberdayaan koperasi serta peningkatan kerjasama kemitraan.

3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Dalam rencana tata ruang wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Koperasi dan UKM mendukung pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, dan zona terpengaruh. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendukung pengembangan zonasi di kawasan agropolitan berupa zona pusat produksi di Kabupaten Bangka selatan sebagai lumbung padi dan lokasi untuk food estate, zona pusat industri pengolahan di Kabupaten Bangka Barat dengan Peltim Muntok.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, serta implikasi RTRW dan KLHS, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM selama empat tahun ke depan adalah daya saing Koperasi dan UKM di Babel yang belum maksimal. Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standarisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM. Adapun Isu Strategis Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TUJUAN DAN SASARAN

IV

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur periode 2017-2022, pada bulan Mei 2022, dan sedangkan pemilihan kepala daerah yang baru direncanakan pada tahun 2024 maka untuk mengisi kekosongan tahun 2023-2024 Pemerintah melalui Inmendagri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Dalam kebijakan tersebut, diatur bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 2023-2026 berpedoman pada RPJPD dengan kepala daerah ditunjuk oleh Pemerintah pusat sebagai pejabat kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2023-2024, sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Sesuai dengan RPJPD, maka pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dengan visi **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju berwawasan Lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia handal dan Pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera”** dan dengan 5 Misi yaitu :

1. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Dalam mendukung sasaran pembangunan daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun tujuan dan sasaran pembangunan yang terangkum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023-2026. Untuk tujuan dan sasaran

pembangunan Dinas Koperasi dan UKM adalah Tujuan ke-1 Renstra adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM) dengan indicator Predikat RB Perangkat Daerah (DKUKM), sedangkan sasarannya adalah Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM) dengan indicator Nilai RB Perangkat Daerah (DKUKM). Tujuan ke-2 Renstra adalah Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM dengan indicator Pertumbuhan tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM dengan indicator persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi.

Dalam sinergitas antara sasaran Rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2023-2026 dapat dilihat dari sasaran Renstra yaitu Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM identic dengan sasaran RPD 2023-2026 yaitu Meningkatkan kesempatan kerja. Sesuai dengan tupoksi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, yaitu membina dan mengawal pembangunan KUKM di Provinsi kepulauan Bangka Belitung baik dari aspek permodalan, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas atau SDM dan perijinan. Namun tujuan dan sasaran yang difokuskan adalah peningkatan kesempatan kerja, diharapkan dengan semakin berkembangnya koperasi dan UKM, akan banyak menciptaka lapangan kerja serta menurunkan angka pengangguran.

Hubungan antara tujuan-sasaran Kepala Daerah dan tujuan-sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi-Misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	RPD (BAPPEDA)				RENSTRA				
	UNIT : Sekretariat (Perencanaan)								
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM)	Predikat RB Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai RB Perangkat Daerah (DKUKM)
	UNIT : BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA BALAI PELATIHAN KOPERASI								

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	RPD (BAPPEDA)				RENSTRA				
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Persentase pertumbuhan koperasi
							Persentase pertumbuhan UKM		Persentase pertumbuhan UKM
							Persentase SDM KUKM yang berkualitas		Persentase SDM KUKM yang berkualitas

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



3.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah.

Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya misi ke-empat dalam RPD ProKepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 yaitu Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan pertumbuhan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM. Sasaran yang ingin dicapai yakni Meningkatnya Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM dengan indikator persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi dan persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Usaha Kecil dan menengah. strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM KUKM melalui pelatihan dan sistem online. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi industri 4.0 Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola KUKM.

- 2) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kualitas dari sisi kelembagaannya, salah satunya melalui pengawasan pada entitas koperasi dan UKM tersebut. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 3) Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Sejauh ini akses pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih adanya asimetri informasi terhadap pembiayaan dan sulitnya sebagian besar UKM dalam mengakses permodalan karena usahanya yang *feasible* namun tidak *bankable*. Sehingga arah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM. Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip *demand and supply*. Arah kebijakan yang perlu kita tempuh untuk mewujudkannya adalah Penguatan manajemen usaha KUKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.
 - 5) Meningkatkan omset Koperasi dan UKM. Muara dari semua strategi yang telah kita upayakan dalam memberdayakan koperasi dan UKM adalah agar omsetnya meningkat. Bagi koperasi, peningkatan omset dapat berimbas pada meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu bagi pelaku UKM, peningkatan omset dapat membuat usaha mereka berkembang sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja baru. Sehingga untuk mewujudkannya arah kebijakan yang perlu kita tempuh adalah Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk KUKM.
-

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025		
Misi - 3	Mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dinas	Peningkatan profesionalisme ASN serta efektifitas
			program dan efisiensi anggaran
Misi - 4	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	Meningkatkan kualitas SDM KUKM melalui pelatihan dan sistem online	Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka belitung
		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka belitung
		Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Provinsi Kepulauan Bangka belitung

Visi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025		
Misi - 3	Mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM	Penguatan manajemen usaha K- UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.
		Meningkatkan omset Koperasi dan UKM	Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk KUKM

3.2. Program Unggulan

Program unggulan atau icon merupakan program strategis Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan untuk mendukung kebijakan Nasional yang tercermin dalam RPJMN 2020-2024 serta mendukung tujuan pembangunan daerah dalam Rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026. Beberapa Program unggulan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

1. UMKM Bangkit

UMKM Bangkit merupakan program inovasi Dinas Koperasi dan UKM provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui aplikasi Si-Dulang Babel (Sistem Informasi Data Tunggal UMKM berdaya dan Berkembang). Aplikasi ini mencakup Data Statistik, jumlah UMKM di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 7 Kabupaten Kota, baik sector usaha, jumlah tenaga kerja, kelas usaha dan omzet usaha. Aplikasi ini di input oleh tenaga pendataan di tiap kecamatan di 7 Kabupaten Kota dan di Update setiap bulan.



2. Upgrading UMKM

Upgrading UMKM merupakan program unggulan dalam rangka pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui *digitalisasi* (mendorong usaha mikro kecil (UMK) memanfaatkan teknologi internet dan masuk ke ekosistem digital); *standardisasi* (meningkatkan sertifikasi UMK guna perluasan pangsa pasar); *sosialisasi* untuk pengembangan kapasitas SDM UMK serta *kolaborasi* guna akselerasi pemasaran UMK. Selain itu untuk *sustainability* (keberlanjutan) UMK (utamanya untuk komoditas unggulan) perlu sistem manajerial yang terstruktur dan infrastruktur yang memadai sehingga diperlukan penghubung yang mengatur aktivitas agregasi, distribusi, marketing dan identifikasi potensi produk yang sesuai keinginan konsumen melalui implementasi *regional product hub*. Kegiatan ini sendiri terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pemetaan kondisi eksisting dan potensi pengembangan, survey pemetaan awal kebutuhan aktor, FGD rantai nilai produk, konsep regional product hub, sosialisasi regional product hub, implementasi regional product hub dan evaluasi regional product hub.



3. Program UMKM Go Digital

Demi meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, pemerintah baik pusat maupun daerah terus membangun literasi digital dengan berbagai program. Sosialisasi, fasilitasi, penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi digital dan e-commerce terus dilakukan. Di tingkat pusat, Kemenkop dan UKM serta Kemkominfo bersama platform e-commerce telah memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan e-commerce ke berbagai daerah.

Sedangkan di daerah Provinsi Kep Babel, pengenalan literasi digital terus dilakukan melalui berbagai pelatihan baik yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka maupun secara virtual. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan pameran virtual dan program kerjasama dengan marketplace nasional guna mendorong UMKM di Babel bertransformasi digital sesegera mungkin. Selain itu, pemerintah dan stake holder lain terus melakukan pendampingan kepada UMKM untuk memperbaiki proses bisnis serta memperluas akses pasar bagi UMKM.



4. Pengembangan produk Minyak Asiri

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui UPTD Balatkop UKM telah menetapkan komoditas minyak atsiri sebagai salah satu potensi sumber daya alam lokal yang akan dikembangkan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi yaitu Universitas Gadjah Mada. Pelatihan ini diberikan mengingat potensi bahan baku minyak atsiri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti sereh wangi, nilam, kayu putih, lada dan potensi pasar ekspor untuk produk minyak atsiri yang sangat besar.

Minyak atsiri telah digunakan sebagai bahan baku industri untuk bahan perasa (essence), perisa (flavor) dan wewangian (fragrance). Selain itu produk olahan minyak atsiri juga dipergunakan untuk bahan baku industri jamu dan fitofarmaka. Seluruh jenis produk turunan minyak atsiri dipercaya mempunyai khasiat positif untuk kesehatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah ada petani dan umkm yang bergerak di sektor hulu dan hilir minyak atsiri. Di sektor hilir, terdapat umkm yang telah memproduksi produk olahan minyak atsiri. Di sektor hulu atau perkebunan terdapat puluhan bahkan ratusan petani atsiri yang menjadi pemasok bahan baku. Dengan demikian rantai hulu-hilir menjadi terintegrasi. Melalui rantai hulu hilir yang terintegrasi ini akan tercipta nilai ekonomi yang harmonis, termasuk berperan dalam membangkitkan ekonomi rakyat di pedesaan.



5. Pengembangan Produk kerajinan Lidi Nipah

Dalam pemulihan perekonomian akibat pandemi virus corona (covid-19) sekarang ini yang melanda berbagai sektor terutama sektor ekonomi baik seluruh negara dan tak terlepas juga imbasnya kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk itu kita perlu berusaha keluar dari masalah tersebut, untuk melakukan berbagai terobosan maupun inovasi agar kita dapat keluar dari keterpurukan perekonomian yang kita hadapi,

Salah satu terobosan dan inovasi tersebut adalah pemanfaatan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa komoditas lidi nipah dan produk turunannya berupa kerajinan lidi nipah.

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui UPTD Balatkop UKM telah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin lidi nipah sebanyak 7 (tujuh) angkatan pada tahun 2020 dan 4 (empat) angkatan pada tahun 2021. Pelatihan tersebut diberikan mengingat bahan baku lidi nipah yang sangat melimpah dan potensi pasar ekspor untuk produk home decor berbahan alami yang sangat besar. Untuk mendorong ekspor produk home decor berbahan baku lidi nipah diperlukan kurasi yang sangat ketat yang meliputi kualitas produk, manajemen usaha, kontinuitas produksi, dll. Oleh karena itu dinas koperasi ukm mengadakan pelatihan dan pendampingan kerajinan lidi nipah dengan harapan kuantitas dan kualitas kerajinan lidi nipah dapat bersaing di pasar ekspor.



6. Pengembangan Produk Makanan Laut

Kearifan lokal masyarakat pesisir merupakan salah satu potensi dalam menunjang keberlangsungan hidup ditengah keterbatasan modal dan peralatan melaut. Kearifan lokal salah satunya dari sumber daya alam merupakan potensi yang mampu menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya lokal melalui pengelolaan hasil ikan menjadi produk olahan adalah salah satu upaya masyarakat nelayan mengembangkan potensi lokal berbasis kearifan lokal. Faktor eksternal tersebut juga mendorong eksistensi produk lokal bisa terus dikembangkan dan diproduksi terutama manajemen pengolahan hasil laut menjadi produk olahan dari para keluarga nelayan. Manajemen yang dikembangkan melalui upaya pembentukan UMKM dengan menggunakan analisa SWOT untuk mengembangkan produk lokal. Hasil olahan tersebut seperti krupuk ikan tengiri, ikan asap, petis ikan dan ikan kering. Upaya perbaikan untuk membangun UMKM melalui partisipasi keluarga nelayan yang saat ini dipertahankan sehingga produk lokal menjadi ciri khas daerah. Manajemen pengelolaan hasil laut yang terintegrasi tersebut mampu meningkatkan perekonomian nelayan di dalam memenuhi kebutuhan hidup.



7. Program Babel Academy

International Council Small Business bekerjasama dengan Schoters menginisiasi Program **BABEL ACADEMY**. Program ini merupakan Bimbingan Beasiswa Luar Negeri untuk putra- putri Provinsi Bangka Belitung agar dapat menempuh pendidikan di luar negeri. Bimbingan yang dilakukan berupa bimbingan pembuatan dokumen beasiswa, simulasi interview, sharing

pengalaman penerima beasiswa dan mendaftar beasiswa luar negeri. Dengan begitu, putra-putri Provinsi Bangka Belitung

ini bisa memperoleh perspektif baru secara global dengan menempuh pendidikannya di luar negeri dan dapat kembali untuk membangun daerah tercinta.



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas untuk tahun 2023-2026 mengacu pada Kepmen 050-5889 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena untuk program prioritas tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan sesuai urusan sebagai berikut :

Pada tahun 2023 – 2026 sesuai dengan Kepmen 050-5889 terdapat 8 (delapan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 7 (tujuh) program teknis dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam

Kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
- 2) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan:

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupate/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 2) Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan:

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

8. Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Rencana Pendanaan untuk Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2023-2026 adalah seperti tergambar pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1.
Rencana Pendanaan Dinas KUKM tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					16,637,121,254	17,388,252,784		18,910,984,031		20,215,839,009		20,215,839,009			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas)	Nilai Sakip PD		Persen	80.5	70,000,000	81	75,000,000	81.5	80,000,000	82	85,000,000		85,000,000	Pangkalpinang	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	13	Dokumen	13	70,000,000	13	75,000,000	13	80,000,000	13	85,000,000	13	85,000,000	Pangkalpinang	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 73

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Bulan	7	50,000,000	7	55,000,000	7	55,000,000	7	60,000,000	6	60,000,000		Pangkalpinang
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	20,000,000	6	20,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000		Pangkalpinang
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		persen	85.2	11,470,374,771	85.4	11,746,668,976	85.6	12,288,571,033	86.8	12,841,555,362	86.8	12,841,555,362		Pangkalpinang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	4	Dok	4 Dok	8,576,061,981	4 Dok	8,790,463,531	4 Dok	9,010,225,119	4 Dok	9,235,480,747		9,235,480,747		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang	55	8,576,061,981	55	8,790,463,531	55	9,010,225,119	55	9,235,480,747	55	9,235,480,747		Pangkalpinang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)		Dok	4 Dok	135,110,200	4 Dok	143,313,000	4 Dok	75,703,650	4 Dok	80,738,833		80,738,833		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 74

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	6	55,060,000	8	57,813,000	8	60,703,650	8	63,738,833	8	63,738,833		Pangkalpinang
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Orang	97	80,050,200	97	85,500,000								Pangkalpinang
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dok					2	15,000,000	2	17,000,000	2	17,500,000		Pangkalpinang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	1	Paket	1	1,018,191,535	1	1,120,010,689	1	1,232,011,757	1	1,355,212,933	1	1,355,212,933		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 75

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	44,985,511	1	49,484,062	1	54,432,468	1	59,875,715	1	59,875,715		Pangkalpinang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	45,000,000	1	49,500,000	1	54,450,000	1	59,895,000	1	59,895,000		Pangkalpinang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	26,422,000	1	29,064,200	1	31,970,620	1	35,167,682	1	35,167,682		Pangkalpinang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	128,917,794	1	141,809,573	1	155,990,531	1	171,589,584	1	171,589,584		Pangkalpinang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Paket	1	20,400,000	1	22,440,000	1	24,684,000	1	27,152,400	1	27,152,400		Pangkalpinang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 76

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	177,859,230	1	195,645,153	1	215,209,668	1	236,730,635	1	236,730,635		Pangkalpinang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Paket	1	69,625,000	1	76,587,500	1	84,246,250	1	92,670,875	1	92,670,875		Pangkalpinang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	1	454,982,000	1	500,480,200	1	550,528,220	1	605,581,042	1	605,581,042		Pangkalpinang
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Paket	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	1	66,550,000		Pangkalpinang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang tersedia		Paket	1	530,000,000	1	580,000,000	1	305,000,000	1	280,000,000	1	280,000,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 77

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000		30,000,000		Pangkalpinang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan		Unit	15	500,000,000	17	550,000,000	10	275,000,000	5	250,000,000		250,000,000		Pangkalpinang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	4	975,000,000					2	750,000,000				Pangkalpinang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang tersedia		Laporan	12	1,816,594,500	12	1,885,153,950	12	1,957,741,845	12	2,034,690,342	12	2,034,690,341		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	29,794,500	12	32,773,950	12	36,051,345	12	39,656,480	12	39,656,479		Pangkalpinang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 78

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	272,800,000	12	300,080,000	12	330,088,000	12	363,096,800	12	363,096,800		Pangkalpinang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	12	6,000,000	12	6,600,000	12	7,260,000	12	7,986,000	12	7,986,000		Pangkalpinang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	13	1,508,000,000	13	1,545,700,000	13	1,584,342,500	13	1,623,951,063	13	1,623,951,062		Pangkalpinang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia		Laporan	5	412,608,090	5	433,238,495	5	454,900,419	5	477,645,440	5	477,645,440		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 79

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	6	127,740,000	6	134,127,000	6	140,833,350	6	147,875,018	6	147,875,018		Pangkalpinang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	3	200,000,000	3	210,000,000	3	220,500,000	3	231,525,000	3	231,525,000		Pangkalpinang
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	5	15,000,000	5	15,750,000	5	16,537,500	5	17,364,375	5	17,364,375		Pangkalpinang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar (unit)		Unit	5	15,000,000	5	15,750,000	5	16,537,500	5	17,364,375	5	17,364,375		Pangkalpinang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 80

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	3	54,868,090	3	57,611,495	3	60,492,069	3	63,516,673	3	63,516,673		Pangkalpinang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPT BALKOP)	Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DKUKM)		%	85.2	871,746,483	85.4	891,583,807	85.6	437,412,998	85.8	459,283,647	85.8	459,283,647		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT Balkop)	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		bulan	12	229,046,633	12	240,498,965	12	252,523,913	12	265,150,109	12	265,150,109		
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Laporan	12	5,000,000	12	5,250,000	12	5,512,500	12	5,788,125	12	5,788,125		Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	46,546,633	12	48,873,965	12	51,317,663	12	53,883,546	12	53,883,546		Pangkalpinang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		bulan	12	25,000,000	12	26,250,000	12	27,562,500	12	28,940,625	12	28,940,625		Pangkalpinang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	10,000,000	12	10,500,000	12	11,025,000	12	11,576,250	12	11,576,250		Pangkalpinang
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	1	2,500,000	12	2,625,000	12	2,756,250	12	2,894,063	12	2,894,063		Pangkalpinang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		Paket	1	15,000,000	12	15,750,000	12	16,537,500	12	17,364,375	12	17,364,375		Pangkalpinang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 82

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Konsultasi SKPD														
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	12	100,000,000	12	105,000,000	12	110,250,000	12	115,762,500	12	115,762,500		Pangkalpinang
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1	25,000,000	12	26,250,000	12	27,562,500	12	28,940,625	12	28,940,625		Pangkalpinang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang tersedia		Laporan	12	67,699,850	12	71,084,843	12	74,639,085	12	78,371,039	12	78,371,039		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	4,000,000	12	4,200,000	12	4,410,000	12	4,630,500	12	4,630,500		Pangkalpinang
			Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan		Laporan	12	57,199,850	12	60,059,843	12	63,062,835	12	66,215,976	12	66,215,976		Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	12	6,500,000	12	6,825,000	12	7,166,250	12	7,524,563	12	7,524,563		Pangkalpinang
Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi		persen	2	150,000,000	3	200,000,000	3	300,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi		ijin usaha	2	150,000,000	3	200,000,000	3	300,000,000	5	350,000,000.00	5.00	350,000,000		7 Kab/Kota
			Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		koperasi	2	150,000,000	3	200,000,000	3	300,000,000	5	350,000,000.00	5.00	350,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang difasilitasi					3	125.000.000	4	150.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000		
			Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah					3	125.000.000	4	150.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa		Persen	20	275,000,000	22	330,000,000	24	375,000,000	27	445,000,000	27	445,000,000		
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		koperasi	20	250,000,000	20	300,000,000	20	325,000,000	20	375,000,000	20	375,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat		dokumen	20	100,000,000	20	125,000,000	20	150,000,000	20	175,000,000	20	175,000,000		7 Kab/Kota
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		koperasi	20	150,000,000	20	175,000,000	20	175,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		koperasi	13	25,000,000	13	30,000,000	13	50,000,000	13	70,000,000	13	70,000,000		7 Kab/Kota
			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat		koperasi	13	25,000,000	13	30,000,000	13	50,000,000	13	70,000,000	13	70,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai		persen	10	150,000,000	12	200,000,000	14	250,000,000	15	300,000,000	15	300,000,000		
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		koperasi	10	150,000,000	10	200,000,000	10	250,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000		7 Kab/Kota
			Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi,	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen,		koperasi	10	75,000,000	10	100,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000		7 Kab/Kota

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 90

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi														
			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan		koperasi	3	75,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000		7 Kab/Kota
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang bersertifikat		persen	95	625,000,000	95	625,000,000	95	650,000,000	95	700,000,000	95	700,000,000		
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih		Orang	50	275,000,000	50	275,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian		Orang	50	275,000,000	50	275,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000		7 Kab/Kota
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM UKM yang terlatih		Orang	200	350,000,000	200	350,000,000	200	350,000,000	200	400,000,000	200	400,000,000		7 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang meningkat Pengetahuan kapasitas dan kompetensi		Orang	200	350,000,000	200	350,000,000	200	350,000,000	200	400,000,000	200	400,000,000		7 Kab/Kota

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 | 92

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan		persen	5	750,000,000	7	800,000,000	9	1,150,000,000	11	1,375,000,000	11	1,375,000,000		
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		koperasi	5	750,000,000	7	800,000,000	7	1,150,000,000	8	1,375,000,000	8	1,375,000,000		7 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		koperasi	5	400,000,000	7	425,000,000	7	550,000,000	8	650,000,000	8	650,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi Usaha		unit usaha	5	200,000,000	7	200,000,000	7	350,000,000	8	475,000,000	8	475,000,000		7 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan		Keluarga	50	150,000,000	70	175,000,000	70	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	0.29	persen	0,47%	3,000,000,000	0,51%	3,300,000,000	0,56%	3,630,000,000	0,62%	3,960,000,000	0,62%	3,960,000,000		7 Kab/Kota
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemutakhiran data dan penguatan kelembagaan UMKM		Dokumen	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Jumlah UMKM yang dibina dan Didampingi		unit	840	2,000,000,000	924	2,300,000,000	1016	2,630,000,000	1117	2,960,000,000	1117	2,960,000,000		7 Kab/Kota
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		unit usaha	700	1,000,000,000	700	1,300,000,000	700	1,500,000,000	700	1,500,000,000	700	1,500,000,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		Orang	840	2,000,000,000	840	2,100,000,000	840	2,250,000,000	840	2,450,000,000	840	2,450,000,000		7 Kab/Kota
			Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah		persen	0.10	2,300,000,000	0.11	2,530,000,000	0.12	2,783,000,000	0.13	3,061,300,000	0.13	3,061,300,000		7 Kab/Kota
			Kegiatan Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah		unit usaha	3	2,300,000,000	4	2,530,000,000	5	2,783,000,000	6	3,061,300,000	6	3,061,300,000		7 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Awal tahun perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		unit usaha	420	1,385,000,000	462	1,500,000,000	508	1,650,000,000	559	1,750,000,000	420	1,750,000,000		7 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		Unit usaha	140	915,000,000	150	1,030,000,000	160	1,133,000,000	170	1,311,300,000	170	1,311,300,000		7 Kab/Kota

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan melalui tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Daerah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2021/2022)	Target Capaian setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	84	86	88	90	92
2	Jumlah Koperasi berkualitas	Unit	6	10	13	16	20
3	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Orang	730	760	790	820	850
4	Jumlah Koperasi yang diawasi	unit	10	12	14	16	18
5	Persentase UMKM yang diberdayakan	Persen	0,29	0,47	0,51	0,56	0,62

N O	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal Renstra (2021/20 22)	Target Capaian setiap Tahun			
				2023	202 4	202 5	2026
-1 6	-2 Persentase UMKM yang dikembangkan	-3 pers en	-4 0,88	-5 3	-6 4	-7 4	-9 4
7	Jumlah sertifikat Halal	buah	44	100	200	200	200
8	Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM	Oran g	32.078	32.2 80	33.1 20	33.7 60	34.5 00

PENUTUP

VIII

Secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026 dapat dinilai cukup baik dengan tercapainya target urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Dokumen perencanaan Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Renja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Keberhasilan dari pelaksanaan amanat Renstra ini tergantung pada dukungan seluruh aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tercapai cita-cita yang kita inginkan.

Kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala mungkin akan selalu kita jumpai dalam perjalanan ke depan namun hal tersebut marilah kita pandang sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak demi tercapainya cita-cita yang telah kita tetapkan dalam Renstra ini.

